



JOURNAL OF CONTEMPORARY
GENDER AND CHILD STUDIES

Vol 5 No 2 Year 2026 Page 670-676

<https://zia-research.com/index.php/jcgscs>

**Pandangan Mahasiswa Terhadap Pemimpin
yang Aktif di Media Sosial Perspektif Fiqih Siyasah**

Moh Restu Hoeruman¹, Aisyah Firdayanti², Muhammad Syahdu³, Amanda Fitri Novianita⁴, Azim Rahman⁵, Nopriyanti⁶, Shagita Alisti⁷, Artia Kasuni⁸, Okta Tiana⁹, Risna Lika Amelia¹⁰, Ferdi¹¹,
M. Agung Pratama¹²

^{1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12} Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, Indonesia

Email: mohrestu@radenfatah.ac.id¹, aisyahfirdayanti07@gmail.com², muhammadsyahdu012@gmail.com³,
amandafitriinvta14@gmail.com⁴, azimrahman1209@gmail.com⁵, yantiniopri469@gmail.com⁶,
shagitaalisti@gmail.com⁷, artiakasuni@gmail.com⁸, oktatiana93@gmail.com⁹,
risnalikaamelia0906@gmail.com¹⁰, ferdixis@gmail.com¹¹, agungpratama2289@gmail.com¹²

ARTICLE INFO

Kata Kunci

Fiqih Siyasah
Kepemimpinan
Media Sosial

ABSTRACT

The development of social media in the digital era has changed communication patterns between leaders and the public. Leaders are now judged not only by their policies but also by how they present themselves and communicate on social media. This study aims to determine students' views on leaders who are active on social media from a Fiqh Siyasah perspective, using descriptive qualitative methods through questionnaires. The results showed that students held quite critical views. They considered social media to have the potential to be a means of public communication, providing information transparency, and conveying public aspirations more openly. However, some respondents believed that leaders' use of social media tends to be more oriented towards image and popularity than towards the actual implementation of leadership responsibilities. From a Fiqh Siyasah perspective, leadership is a mandate that must be carried out with responsibility, honesty, fairness, and ethical communication for the benefit of society. Students do not solely judge leaders by their social media activity, but rather by the alignment between public communication and concrete actions in carrying out leadership. In conclusion, leaders' use of social media must be carried out wisely, ethically, and remain oriented towards the interests of society, rather than merely building a self-image.

ABSTRAK

Perkembangan media sosial di era digital telah mengubah pola komunikasi antara pemimpin dan masyarakat. Pemimpin kini dinilai tidak hanya dari kebijakan, tetapi juga dari cara mereka tampil dan berkomunikasi di media sosial. Penelitian ini bertujuan mengetahui pandangan mahasiswa terhadap pemimpin yang aktif di media sosial ditinjau dari perspektif Fiqih Siyasah, menggunakan metode kualitatif deskriptif melalui penyebaran kuesioner. Hasil penelitian menunjukkan mahasiswa berpandangan cukup kritis. Mereka menilai media sosial berpotensi menjadi sarana komunikasi publik, transparansi informasi, dan penyampaian aspirasi masyarakat secara lebih terbuka. Namun, sebagian responden berpendapat penggunaan media sosial oleh pemimpin cenderung lebih berorientasi pada pencitraan dan popularitas dibanding pelaksanaan tanggung jawab kepemimpinan secara nyata. Dalam perspektif Fiqih Siyasah, kepemimpinan merupakan amanah yang harus dijalankan dengan tanggung jawab, kejujuran, keadilan, dan etika komunikasi demi terwujudnya kemaslahatan masyarakat. Mahasiswa tidak semata menilai pemimpin dari keaktifannya di media sosial, melainkan dari kesesuaian antara komunikasi publik dan tindakan nyata dalam menjalankan kepemimpinan. Kesimpulannya, penggunaan media sosial oleh pemimpin perlu dilakukan secara bijak, etis, dan tetap berorientasi pada kepentingan masyarakat, bukan sekadar membangun citra diri semata.

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi digital telah membawa transformasi besar dalam berbagai aspek kehidupan manusia, tak terkecuali dalam dunia pendidikan (Hoeruman *et al.*, 2025). Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi pada era digital telah membawa perubahan besar dalam pola komunikasi masyarakat, termasuk dalam hubungan antara pemimpin dan masyarakat. Media sosial saat ini tidak hanya digunakan sebagai sarana hiburan, tetapi juga dimanfaatkan sebagai media komunikasi publik, penyampaian informasi, dan interaksi sosial secara lebih terbuka. Kehadiran media sosial memungkinkan seorang pemimpin menyampaikan informasi dan berinteraksi langsung dengan masyarakat tanpa melalui perantara media konvensional. Dalam kondisi ideal, penggunaan media sosial oleh pemimpin seharusnya mampu menjadi sarana transparansi, pelayanan publik, serta media penyampaian informasi yang bermanfaat bagi masyarakat. Dalam perspektif Fiqih Siyasah, kepemimpinan merupakan amanah yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab, kejujuran, keadilan, serta mengutamakan kemaslahatan masyarakat. Oleh karena itu, penggunaan media sosial oleh pemimpin seharusnya tetap memperhatikan etika komunikasi dan nilai-nilai moral dalam kepemimpinan (Gunawan, 2024).

Kondisi nyata yang terjadi saat ini menunjukkan bahwa media sosial tidak selalu digunakan sesuai dengan tujuan ideal tersebut. Kehadiran media sosial justru sering dimanfaatkan sebagai sarana pencitraan politik dan membangun popularitas pribadi. Pemimpin tidak lagi hanya dinilai melalui kebijakan dan aktivitas pemerintahan secara langsung, tetapi juga melalui cara mereka berkomunikasi dan menampilkan diri di media sosial. Banyak masyarakat yang memberikan penilaian terhadap pemimpin berdasarkan konten yang ditampilkan di ruang digital tanpa mengetahui kondisi yang sebenarnya terjadi di lapangan. Sebagian masyarakat juga beranggapan bahwa pemimpin lebih fokus membangun citra dibandingkan menunjukkan kinerja nyata dalam menjalankan tanggung jawab kepemimpinan. Kondisi tersebut menimbulkan berbagai pandangan di kalangan masyarakat, termasuk mahasiswa sebagai kelompok intelektual yang aktif mengikuti perkembangan informasi digital (Umami, *et al.*, 2025).

Mahasiswa memiliki pandangan yang beragam terhadap pemimpin yang aktif di media sosial. Sebagian mahasiswa menilai bahwa media sosial dapat menjadi sarana komunikasi publik dan transparansi informasi yang efektif, sedangkan sebagian lainnya berpendapat bahwa media sosial sering digunakan sebagai alat pencitraan politik. Perbedaan pandangan tersebut menunjukkan bahwa fenomena kepemimpinan digital perlu dikaji lebih mendalam, khususnya dalam perspektif fiqih siyasah yang menekankan pentingnya amanah, etika, dan tanggung jawab moral dalam kepemimpinan. Menurut Al-Mawardi, seorang pemimpin memiliki kewajiban untuk menjaga kemaslahatan masyarakat dan menjalankan amanah secara adil serta bertanggung jawab (Al-Mawardi, t.t.).

Fenomena tersebut mendorong dilakukannya penelitian mengenai pandangan mahasiswa terhadap pemimpin yang aktif di media sosial ditinjau dari perspektif fiqih siyasah. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman mengenai bagaimana mahasiswa menilai fenomena kepemimpinan digital serta relevansi nilai-nilai fiqih siyasah dalam penggunaan media sosial oleh seorang pemimpin pada era digital saat ini.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif yang bertujuan untuk memahami secara mendalam pandangan responden terhadap fenomena kepemimpinan di media sosial. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui penyebaran kuesioner terbuka secara daring menggunakan Google Forms. Instrumen ini dirancang untuk memberikan keleluasaan kepada responden dalam menyampaikan pendapat, pengalaman, serta penilaian mereka tanpa batasan pilihan jawaban yang kaku. Data yang diperoleh tidak hanya bersifat deskriptif, tetapi juga memuat makna dan konteks yang lebih mendalam. Pendekatan ini dipilih agar peneliti dapat menggali secara lebih komprehensif persepsi mahasiswa mengenai pemimpin yang aktif di media sosial dalam perspektif fiqih siyasah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pandangan Mahasiswa terhadap Pemimpin yang Aktif di Media Sosial

Berdasarkan hasil penelitian, perkembangan media sosial memengaruhi pola komunikasi antara pemimpin dan masyarakat. Kehadiran media sosial memungkinkan seorang pemimpin menyampaikan informasi, menunjukkan aktivitas kerja, serta berinteraksi secara langsung dengan masyarakat. Dalam

kondisi tersebut, mahasiswa sebagai kelompok intelektual memiliki pandangan yang beragam terhadap fenomena pemimpin yang aktif di media sosial. Berdasarkan hasil kuesioner yang telah dilakukan, pandangan mahasiswa dapat dilihat dalam dua bentuk, yaitu pandangan positif dan pandangan negatif.

Pandangan Positif Mahasiswa terhadap Pemimpin yang Aktif di Media Sosial

Berdasarkan hasil penelitian, sebagian besar responden memberikan pandangan positif terhadap pemimpin yang aktif di media sosial. Mahasiswa menilai bahwa media sosial mempermudah masyarakat dalam memperoleh informasi mengenai kegiatan, program kerja, maupun kebijakan yang dijalankan oleh seorang pemimpin. Media sosial juga dianggap mampu menciptakan hubungan yang lebih dekat antara pemimpin dan masyarakat karena komunikasi dapat dilakukan secara lebih cepat dan terbuka.

Beberapa responden menyatakan bahwa pemimpin yang aktif di media sosial terlihat lebih responsif terhadap aspirasi dan kritik masyarakat. Aktivitas pemimpin di media sosial dinilai dapat meningkatkan transparansi publik karena masyarakat dapat melihat secara langsung bagaimana seorang pemimpin menjalankan tugas dan merespons persoalan sosial yang sedang terjadi. Media sosial dipandang tidak hanya sebagai sarana hiburan, tetapi juga sebagai media komunikasi publik yang efektif pada era digital saat ini.

Mahasiswa juga berpendapat bahwa kehadiran pemimpin di media sosial menunjukkan kemampuan pemimpin dalam menyesuaikan diri dengan perkembangan teknologi dan pola komunikasi masyarakat modern. Menurut responden, media sosial dapat membantu pemimpin menjangkau masyarakat secara lebih luas, khususnya generasi muda yang aktif menggunakan platform digital dalam kehidupan sehari-hari. Pandangan tersebut sejalan dengan pendapat Gunawan yang menyatakan bahwa media sosial dapat memperkuat hubungan antara pemimpin dan masyarakat melalui komunikasi yang lebih terbuka dan cepat (Gunawan, 2024).

Pandangan Negatif Mahasiswa terhadap Pemimpin yang Aktif di Media Sosial

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa sebagian mahasiswa memiliki pandangan negatif terhadap pemimpin yang terlalu aktif di media sosial. Beberapa responden menilai bahwa aktivitas pemimpin di media sosial terkadang lebih menonjolkan pencitraan dibandingkan tanggung jawab kepemimpinan yang sebenarnya. Konten yang dibagikan dianggap hanya bertujuan untuk menarik simpati masyarakat dan membangun popularitas pribadi.

Sebagian responden juga berpendapat bahwa masyarakat sering kali terlalu mudah memberikan penilaian hanya berdasarkan apa yang terlihat di media sosial. Padahal, tidak semua informasi yang ditampilkan mencerminkan kondisi nyata di lapangan. Menurut mahasiswa, kualitas seorang pemimpin tidak dapat diukur hanya dari keaktifannya di media sosial, melainkan dari kemampuan menjalankan amanah dan menyelesaikan persoalan masyarakat secara nyata.

Beberapa responden juga mengungkapkan bahwa penggunaan media sosial secara berlebihan dapat mengurangi fokus pemimpin terhadap tugas utamanya dalam menjalankan pemerintahan. Mahasiswa menilai bahwa aktivitas di media sosial harus tetap disertai dengan tanggung jawab dan bukti kerja nyata agar tidak hanya menjadi sarana pencitraan semata. Pandangan tersebut menunjukkan bahwa mahasiswa memiliki sikap yang cukup kritis dalam menilai fenomena kepemimpinan digital.

Berdasarkan hasil penelitian tersebut, dapat dipahami bahwa mahasiswa memiliki pandangan yang cukup objektif terhadap pemimpin yang aktif di media sosial. Mahasiswa mengakui bahwa media sosial dapat menjadi sarana komunikasi dan transparansi publik yang efektif, tetapi juga menyadari adanya potensi penyalahgunaan media sosial untuk kepentingan pencitraan politik. Penggunaan media sosial oleh pemimpin perlu dilakukan secara bijak, bertanggung jawab, dan tetap berorientasi pada kepentingan masyarakat (Gantiani *et al.*, 2025).

Kriteria Pemimpin dalam Perspektif Fiqih Siyasah

Perspektif Fiqih Siyasah memandang kepemimpinan merupakan amanah yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab terhadap masyarakat. Seorang pemimpin tidak hanya dipandang sebagai pihak yang memiliki kekuasaan, tetapi juga sebagai individu yang bertugas menjaga keadilan, kesejahteraan, dan ketertiban dalam kehidupan sosial. Fiqih siyasah memberikan perhatian besar terhadap kriteria yang

harus dimiliki oleh seorang pemimpin agar kepemimpinan yang dijalankan tetap sesuai dengan nilai-nilai Islam dan prinsip kemaslahatan masyarakat.

Al-Mawardi dalam kitab *Al-Ahkam As-Sulthaniyyah*, seorang pemimpin ideal harus memiliki sifat adil, amanah, mampu menjalankan tugas pemerintahan, serta memiliki kemampuan dalam mengambil keputusan demi kemaslahatan masyarakat. Keadilan menjadi salah satu syarat utama karena seorang pemimpin bertanggung jawab terhadap seluruh lapisan masyarakat tanpa membedakan golongan tertentu. Pemimpin juga dituntut memiliki integritas dan kejujuran agar tidak menyalahgunakan kekuasaan yang dimilikinya (Al-Mawardi, 2016).

Hasil kuesioner menunjukkan bahwa sebagian besar responden menilai seorang pemimpin tidak cukup hanya aktif di media sosial atau memiliki popularitas di ruang digital. Mahasiswa berpendapat bahwa kualitas utama seorang pemimpin terletak pada kemampuan menjalankan amanah dan tanggung jawab secara nyata. Beberapa responden menyatakan bahwa pemimpin yang baik adalah pemimpin yang mampu menunjukkan kepedulian terhadap masyarakat, bersikap jujur, serta mampu memberikan solusi terhadap persoalan yang dihadapi rakyat.

Responden juga menilai bahwa sikap adil merupakan salah satu kriteria penting yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin. Menurut mahasiswa, seorang pemimpin harus mampu memperlakukan masyarakat secara setara tanpa memandang latar belakang sosial, ekonomi, maupun kelompok tertentu. Pandangan tersebut menunjukkan bahwa mahasiswa tidak hanya menilai pemimpin dari popularitas digital, tetapi juga dari tanggung jawab dan kinerja nyata yang ditunjukkan.

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa mahasiswa menaruh perhatian terhadap sikap amanah seorang pemimpin. Beberapa responden berpendapat bahwa pemimpin yang hanya berfokus membangun citra di media sosial, tetapi tidak menunjukkan kinerja nyata, dianggap belum mencerminkan kepemimpinan yang baik. Kesesuaian antara ucapan, tindakan, dan kebijakan dinilai penting dalam membangun kepercayaan masyarakat terhadap pemimpin.

Kemampuan komunikasi juga dinilai penting dimiliki oleh seorang pemimpin, terutama dalam menghadapi perkembangan teknologi dan media digital saat ini. Kemampuan tersebut tetap harus diimbangi dengan tanggung jawab moral dan etika kepemimpinan agar penggunaan media sosial tidak menyimpang dari tujuan utama kepemimpinan. Mahasiswa berpendapat bahwa media sosial seharusnya digunakan sebagai sarana pelayanan dan komunikasi publik, bukan semata-mata untuk meningkatkan popularitas pribadi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa mahasiswa memiliki pemahaman yang cukup baik mengenai kriteria pemimpin dalam perspektif fiqih siyasah. Mahasiswa menilai pemimpin tidak hanya dari keaktifannya di media sosial, tetapi juga dari sikap amanah, keadilan, tanggung jawab, dan kemampuan menjalankan tugas kepemimpinan secara nyata. Pandangan tersebut menunjukkan bahwa nilai-nilai kepemimpinan dalam fiqih siyasah masih relevan digunakan sebagai pedoman dalam menilai kepemimpinan di era digital saat ini (Afiandi, et al., 2025).

Etika Penggunaan Media Sosial bagi Pemimpin dalam Perspektif Fiqih Siyasah

Perkembangan teknologi informasi telah menjadikan media sosial sebagai salah satu sarana komunikasi yang banyak digunakan oleh berbagai kalangan, termasuk pemimpin. Media sosial tidak hanya dimanfaatkan untuk menyampaikan informasi, tetapi juga menjadi ruang interaksi antara pemimpin dan masyarakat. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa penggunaan media sosial oleh pemimpin perlu disertai etika komunikasi yang baik agar informasi yang disampaikan memberikan manfaat serta tidak menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat. Perspektif fiqih siyasah menekankan bahwa penggunaan media sosial oleh pemimpin harus tetap berlandaskan etika komunikasi publik.

Hasil kuesioner menunjukkan bahwa sebagian besar responden memandang media sosial sebagai sarana positif apabila digunakan secara bijak oleh seorang pemimpin. Mahasiswa berpendapat bahwa media sosial seharusnya dimanfaatkan pemimpin untuk menyampaikan informasi yang akurat, memberikan edukasi kepada masyarakat, serta menunjukkan kepedulian terhadap berbagai persoalan sosial. Responden menilai bahwa penggunaan media sosial yang tepat dapat menciptakan komunikasi yang lebih terbuka antara pemimpin dan masyarakat.

Beberapa responden menilai bahwa etika komunikasi merupakan aspek penting yang harus diperhatikan oleh seorang pemimpin dalam penggunaan media sosial. Mahasiswa menilai bahwa pemimpin

harus menjaga tutur kata, menghindari penyebaran informasi yang belum terverifikasi, serta tidak menggunakan media sosial untuk menyerang pihak tertentu. Pemimpin dipandang perlu menunjukkan sikap bijaksana serta menjaga kualitas komunikasi yang kondusif di ruang publik digital.

Perspektif fiqh siyasah memandang perilaku tersebut berkaitan erat dengan prinsip amanah dan tanggung jawab moral dalam kepemimpinan. Seorang pemimpin tidak hanya bertanggung jawab terhadap kebijakan yang ditetapkan, tetapi juga terhadap informasi dan sikap yang ditampilkan kepada masyarakat. Media sosial seharusnya dimanfaatkan sebagai sarana pelayanan publik dan penyampaian informasi yang bermanfaat, bukan sebagai media penyebaran konflik maupun kepentingan pribadi. Pendapat tersebut sejalan dengan pandangan Umami, Rizman, dan Putra yang menyatakan bahwa kepemimpinan dalam Islam menekankan pentingnya tanggung jawab moral dan etika dalam menjalankan amanah kepemimpinan (Fikriana & Rezki, 2024).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian responden menilai penggunaan media sosial oleh pemimpin cenderung berlebihan dan lebih berorientasi pada pencitraan dibandingkan pelayanan kepada masyarakat. Konten yang terlalu berorientasi pada popularitas dinilai dapat mengurangi esensi kepemimpinan yang seharusnya mengutamakan kepentingan masyarakat. Mahasiswa berpendapat bahwa pemimpin perlu menjaga keseimbangan antara aktivitas di media sosial dan pelaksanaan tugas kepemimpinan secara nyata.

Beberapa responden juga mengungkapkan bahwa media sosial memengaruhi cara masyarakat dalam menilai seorang pemimpin. Mahasiswa menilai bahwa pemimpin harus berhati-hati dalam menyampaikan pendapat maupun membagikan konten di media sosial agar tidak menimbulkan kesalahpahaman di tengah masyarakat. Sikap tersebut dinilai penting karena setiap tindakan dan pernyataan pemimpin dapat memengaruhi opini publik secara luas.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa mahasiswa memiliki perhatian yang cukup besar terhadap etika penggunaan media sosial oleh pemimpin. Mahasiswa menilai bahwa media sosial dapat menjadi sarana komunikasi dan transparansi publik yang efektif apabila digunakan secara bertanggung jawab. Penggunaan media sosial yang berlebihan dan hanya berorientasi pada pencitraan dinilai tidak sejalan dengan nilai-nilai kepemimpinan dalam fiqh siyasah. Pemimpin perlu menggunakan media sosial secara bijak, menjaga etika komunikasi publik, serta tetap mengutamakan kepentingan masyarakat dalam setiap aktivitas digital yang dilakukan.

Analisis Pandangan Mahasiswa terhadap Pemimpin Digital Ditinjau dari Fiqh Siyasah

Perkembangan media sosial pada era digital telah memengaruhi pola penilaian masyarakat terhadap seorang pemimpin. Penilaian terhadap pemimpin tidak lagi hanya didasarkan pada kebijakan dan aktivitas pemerintahan secara langsung, tetapi juga pada cara pemimpin berkomunikasi dan menampilkan diri di media sosial. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa media sosial telah menjadi ruang publik yang berpengaruh dalam pembentukan citra dan kepercayaan masyarakat terhadap pemimpin. Hasil kuesioner menunjukkan bahwa mahasiswa memiliki pandangan yang cukup kritis terhadap fenomena pemimpin digital, khususnya yang berkaitan dengan nilai-nilai kepemimpinan dalam perspektif fiqh siyasah.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar responden menilai media sosial dapat memberikan dampak positif terhadap hubungan antara pemimpin dan masyarakat. Mahasiswa berpendapat bahwa media sosial mempermudah masyarakat dalam memperoleh informasi mengenai kegiatan, kebijakan, serta respons pemimpin terhadap berbagai persoalan publik. Media sosial juga dinilai mampu menciptakan komunikasi yang lebih terbuka dan interaktif sehingga masyarakat merasa lebih dekat dengan pemimpinnya.

Perspektif fiqh siyasah memandang keterbukaan informasi dan komunikasi dengan masyarakat sebagai bagian dari tanggung jawab pemimpin dalam menjalankan amanah. Pemimpin dituntut untuk mengutamakan kepentingan rakyat serta menjaga hubungan yang baik dengan masyarakat. Penggunaan media sosial untuk menyampaikan informasi publik dapat dipandang sebagai bentuk transparansi dan pelayanan kepada masyarakat. Pandangan tersebut sejalan dengan pendapat Gunawan yang menyatakan bahwa media sosial mampu memperkuat hubungan antara pemimpin dan masyarakat melalui komunikasi yang lebih cepat dan terbuka (Armedi, 2022).

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa mahasiswa tidak sepenuhnya memberikan penilaian positif terhadap aktivitas pemimpin di media sosial. Beberapa responden berpendapat bahwa media sosial

sering digunakan sebagai sarana pencitraan politik dan pembentukan popularitas pribadi. Konten yang ditampilkan dinilai lebih berorientasi pada popularitas daripada pelaksanaan tanggung jawab kepemimpinan secara nyata. Mahasiswa menilai bahwa pemimpin yang terlalu fokus membangun citra di media sosial berpotensi mengabaikan tugas utama dalam menjalankan pemerintahan.

Sebagian responden juga mengungkapkan bahwa masyarakat terkadang terlalu mudah memberikan penilaian berdasarkan tampilan media sosial tanpa memahami kondisi yang sebenarnya terjadi di lapangan. Mahasiswa berpendapat bahwa kualitas seorang pemimpin tidak hanya dinilai dari keaktifannya di media sosial, tetapi juga dari kemampuan menjalankan amanah, bersikap adil, serta menyelesaikan persoalan masyarakat secara nyata. Pandangan tersebut menunjukkan bahwa mahasiswa memiliki sikap yang cukup objektif dalam menilai fenomena kepemimpinan digital.

Perspektif fiqh siyasah memandang kepemimpinan tidak hanya berkaitan dengan kemampuan membangun komunikasi publik, tetapi juga menyangkut amanah, kejujuran, dan tanggung jawab moral. Seorang pemimpin harus mampu menjaga kesesuaian antara pernyataan yang disampaikan kepada masyarakat dan tindakan nyata yang dilakukan. Penggunaan media sosial oleh pemimpin perlu didasarkan pada nilai etika dan kepentingan masyarakat, bukan sekadar untuk membentuk citra positif di ruang digital. Pendapat tersebut sesuai dengan pandangan Umami, Rizman, dan Putra yang menjelaskan bahwa tujuan utama kepemimpinan dalam Islam adalah menciptakan kemaslahatan masyarakat melalui tanggung jawab dan etika kepemimpinan yang baik (Romdhloni, 2025).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa mahasiswa memiliki pemahaman yang cukup baik terhadap fenomena kepemimpinan digital. Mahasiswa mengakui bahwa media sosial dapat menjadi sarana komunikasi dan transparansi publik yang efektif, tetapi juga menyadari adanya potensi penyalahgunaan media sosial untuk kepentingan pencitraan politik. Pemimpin di era digital dituntut tidak hanya mampu memanfaatkan media sosial secara efektif, tetapi juga menjaga etika, tanggung jawab, dan nilai-nilai kepemimpinan dalam fiqh siyasah agar kepercayaan masyarakat tetap terjaga.

SIMPULAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa mahasiswa memiliki pandangan yang cukup kritis terhadap pemimpin yang aktif di media sosial. Mahasiswa menilai bahwa media sosial dapat memberikan dampak positif apabila dimanfaatkan sebagai sarana komunikasi publik, transparansi informasi, dan penyampaian aspirasi masyarakat. Kehadiran pemimpin di media sosial dinilai mampu mempererat hubungan antara pemimpin dan masyarakat melalui komunikasi yang lebih terbuka dan cepat. Penggunaan media sosial juga dinilai mencerminkan kemampuan pemimpin dalam menyesuaikan diri dengan perkembangan komunikasi digital.

Penggunaan media sosial oleh pemimpin juga dinilai berpotensi menimbulkan dampak negatif apabila lebih berorientasi pada pencitraan dan popularitas pribadi daripada pelaksanaan tanggung jawab kepemimpinan secara nyata. Kualitas seorang pemimpin dinilai tidak hanya berdasarkan keaktifannya di media sosial, tetapi juga dari sikap amanah, keadilan, tanggung jawab, serta kemampuan menyelesaikan persoalan masyarakat secara nyata. Media sosial seharusnya digunakan secara bijak, etis, dan tetap berorientasi pada kepentingan masyarakat.

Perspektif fiqh siyasah memandang kepemimpinan sebagai amanah yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab demi terciptanya kemaslahatan masyarakat. Nilai-nilai kejujuran, keadilan, etika komunikasi, dan tanggung jawab moral tetap menjadi dasar utama dalam menilai kualitas kepemimpinan, termasuk pada era digital saat ini. Penelitian ini menunjukkan bahwa mahasiswa tidak hanya menilai pemimpin dari citra digital yang ditampilkan di media sosial, tetapi juga dari kesesuaian antara komunikasi publik dan tindakan nyata dalam pelaksanaan kepemimpinan.

REFERENSI

- Afiandi, M. T., Pujana, R. and Pronita, E. (2025) 'Peran Sosialisasi Hukum Terhadap Pemahaman Fiqh Siyasah di Kalangan Generasi Z', *Equality: Law and Social*, 1(1), pp. 41–48.
- Al-Mawardi, I. (2016) *Abkam Sulthaniyah: Sistem Pemerintahan Khilafah Islam*. Qisthi Press.
- Armedi, M. (2022) 'Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Kepemimpinan Dalam Islam Dan Pemikiran Politik Al Mawardi'. UIN Raden Intan Lampung.
- Fikriana, A. and Rezki, M.K. (2024) 'Etika politik dan kualifikasi calon legislatif dalam pemilu: Perspektif

- fiqih siyasah', *Aladalah: Jurnal Politik, Sosial, Hukum Dan Humaniora*, 2(1), pp. 235–248.
- Gantiani, I. *et al.* (2025) 'Pengaruh Informasi Melalui Media Sosial@ Upr_Official Terhadap Partisipasi Mahasiswa Universitas Palangka Raya', *Professional: Jurnal Komunikasi dan Administrasi Publik*, 12(2), pp. 817–826.
- Gunawan, A. (2024) *Kepemimpinan melayani di era digital: Mendorong komitmen dan perilaku positif pendidik dalam perguruan tinggi*. Selat Media.
- Hoeruman, M.R. *et al.* (2025) 'Transformasi Pendidikan Agama Islam Menuju Era Digital dan Artificial Intelligence', *Muaddib islamic education journal*, 7(2), pp. 72–83. Available at: <https://doi.org/10.19109/muaddib.v7i2.28200>.
- Romdhloni, K.F. (2025) 'Analisis Nilai Kepemimpinan Fiqih Siyasah Dalam Praktik Politik Dinasti Di Indonesia', *Jurnal Cerdas Hukum*, 3(2), pp. 216–230.